



Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

REFORMASI DAN WESTERNISASI : TRANSFORMASI DINASTI USMANIYAH MENUJU MODERNITAS

REFORM AND WESTERNIZATION: THE OTTOMAN DYNASTY'S TRANSITION TO MODERNITY

AUTHOR:

¹Raja Faisal*
²Fadil SJ

AFFILIATION:

¹UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
²UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia

CORRESPONDING*:

[240201210037@student.uin-
malang.ac.id](mailto:240201210037@student.uin-malang.ac.id)

ARTICLE HISTORY:

Received : 16-12-2024
Revised : 07-07-2025
Accepted : 11-08-2025

Copyright © 2025 by Author(s)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK:

Atikel ini mengkaji mengenai Reformasi Tanzimat dan westernisasi sebagai periode krusial dalam proses modernisasi dan westernisasi Kesultanan Utsmaniyah. Reformasi ini merupakan respons terhadap melemahnya struktur politik, militer, dan ekonomi di tubuh kesultanan Turki Usmani, sekaligus bentuk penyesuaian terhadap dominasi Eropa yang tengah mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mengolaborasikan dengan pendekatan kajian pustaka terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Reformasi Tanzimat menjadi titik balik penting dalam pembentukan sistem pemerintahan modern, penataan ulang hukum, serta transformasi sosial yang mengantarkan pada tumbuhnya nasionalisme Turki. Meski sarat dengan pengaruh nilai-nilai Barat, arus westernisasi tersebut tetap berupaya mempertahankan identitas Islam-Turki dalam bingkai budaya Usmaniyah. Artikel ini menegaskan bahwa Reformasi

Tanzimat bukan sekadar adaptasi terhadap Barat, melainkan strategi sintesis antara tradisi dan modernitas yang kemudian melandasi lahirnya negara-bangsa Turki modern pada awal abad ke-20.

KATA KUNCI:

Reformasi, Westernisasi, Dinasti Usmaniyyah

ABSTRACT:

This article examines the Tanzimat Reforms and Westernization as a crucial period in the modernization and westernization process of the Ottoman Empire. The reforms emerged as a response to the weakening of the political, military, and economic structures within the Ottoman state, as well as an adjustment to the growing European dominance marked by advancements in science, law, and governance. This research employs a qualitative descriptive method combined with a literature review approach, utilizing both primary and secondary sources. The findings reveal that the Tanzimat Reforms marked a significant turning point in the establishment of a modern administrative system, legal restructuring, and social transformation that eventually fostered the rise of Turkish nationalism. Although deeply influenced by Western values, the wave of Westernization still sought to preserve the Islamic-Turkish identity within the Ottoman cultural framework. This article asserts that the Tanzimat Reforms were not merely an adaptation to the West but a strategic synthesis between tradition and modernity that laid the groundwork for the emergence of the modern Turkish nation-state in the early twentieth century.

KEYWORD:

Reform, Westernization, Ottoman Dynasty

PENDAHULUAN

Peradaban Islam kini mencakup lebih dari empat belas abad. Seperti halnya peradaban semua bangsa, peradaban Islam juga mengalami masa naik turun. Pada saat-saat tertentu, peradaban Islam terjadi pertumbuhan serta perkembangan, kemudian terjadi masa kemajuan dan kejayaan, dan pada saat yang lain, peradaban Islam terjadi masa kemunduran bahkan kehancuran. (Dedi Supriyadi 2008)

Bagian dari periode penting dalam peradaban Islam adalah masa Dinasti Turki Utsmani. Sebagai kerajaan Islam terbesar, Dinasti Utsmani memiliki peran strategis

dalam bidang politik, militer, dan budaya. Bermula dari wilayah kecil di Anatolia, dinasti ini mampu memperluas kekuasaannya hingga mencakup wilayah-wilayah seperti Asia Kecil, Eropa Timur, Afrika Utara, dan sebagian Timur Tengah. Keberhasilan tersebut didukung oleh kepemimpinan yang tangguh, kestabilan ekonomi, serta sistem politik dan militer yang terorganisasi dengan baik.

Semenjak abad ke-18, Dinasti Turki Utsmaniyah menghadapi berbagai permasalahan serius, termasuk kemunduran internal dan tekanan dari kekuatan Eropa yang terus berkembang. Untuk menghadapi situasi ini, reformasi Tanzimat dilakukan sebagai upaya memperbarui berbagai sektor kehidupan, seperti administrasi, hukum, militer, dan pendidikan. Di saat yang sama, westernisasi mulai memengaruhi budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Utsmani sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap modernisasi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformasi Tanzimat dan westernisasi dalam Dinasti Utsmani, serta dampaknya terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Dengan pendekatan normatif dan historis, kajian ini berusaha mengungkap bagaimana modernisasi memengaruhi perkembangan Kesultanan Utsmaniyah di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan mengolaborasikan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Moleong mengatakan bahwa kualitatif merupakan pendekatan riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh (*holistik*). Pemahaman ini disampaikan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang disesuaikan dengan konteks alami tempat fenomena itu terjadi, serta menggunakan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017)

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena serta gagasan yang berkaitan dengan Reformasi Tanzimat dan arus westernisasi di dalam Dinasti Utsmaniyah. Melalui metode ini, peneliti berupaya menafsirkan makna, nilai, serta dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi proses transformasi tersebut secara menyeluruh dan kontekstual.

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, arsip resmi, dan karya akademik yang berkaitan dengan tema reformasi Tanzimat dan westernisasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menyajikan fakta-fakta historis secara sistematis, kemudian menafsirkannya melalui kerangka teoretis agar menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai perubahan sosial, politik, dan budaya dalam proses modernisasi Kesultanan Utsmaniyah.

Deskripsi analitis (*tick description*) dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi subjek secara mendalam, dengan menggambarkan

secara menyeluruh berbagai gejala yang terlihat serta menyingkap makna di balik gejala tersebut (noumena). Dengan kata lain, pendekatan ini menjelaskan secara detail hal-hal terkait lainnya mengenai subjek yang dikaji. (Harahap 2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinasti Utsmaniyah Turki menjadi bagian dari beberapa Dinasti atau Kesultanan Islam terbesar dalam sejarah semenjak keruntuhan sejumlah dinasti Islam sebelumnya, seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berhasil muncul sebagai kekuatan Islam yang dominan di kawasan Eropa Timur dan mampu bertahan selama berabad-abad. Keberhasilan tersebut didukung oleh kepemimpinan para sultannya, kekuatan militer yang tangguh, serta stabilitas dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. (Muvid 2022)

Kesultanan Utsmaniyah didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299 M, ketika ia menyatakan dirinya sebagai pemimpin dan membentuk dinasti yang kelak dikenal sebagai Utsmaniyah. Pada awal pendiriannya, kesultanan ini hanyalah sebuah beylik kecil yang terletak di wilayah barat laut Anatolia. Namun, berkat berbagai keberhasilan dalam ekspansi militer, kekuasaan Utsmaniyah meluas hingga mencakup wilayah Balkan serta sebagian kawasan Timur Tengah. (Gunawan and Hendra 2023)

Pada perkembangannya, kekuasaan dinasti ini meluas hingga mencakup Asia Kecil dan kawasan Trakia pada tahun 1354. Selanjutnya, Utsmaniyah berhasil menguasai Selat Dardanella pada tahun 1361, Casablanca pada tahun 1389, dan akhirnya menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453. (Thohir 2009)

Utsman bin Ertugrul mendeklarasikan berdirinya sebuah dinasti Islam pada tahun 1299 M dan menobatkan dirinya sebagai Padişyah Al-Utsman, yang berarti Raja Agung dari Keluarga Utsman. Kemudian di tahun berikutnya, dinasti ini dikenal sebagai Dinasti Utsmaniyah, dengan Utsman I menjadi pemimpin pertamanya. Secara bertahap, ia memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mulai melakukan ekspansi wilayah dengan melakukan penyerangan ke wilayah perbatasan Bizantium dan pada tahun 1317 M berhasil merebut Kota Broessa, yang kemudian pada tahun 1326 M dijadikan sebagai ibukota kerajaan. Kekuasaan dinasti ini meliputi Eropa Timur, kawasan Arab di Asia Barat, Asia Kecil, dan Afrika Utara. (Lapidus 1993)

Dinasti Utsmaniyah, yang bermula dari wilayah kecil di Anatolia Tengah dan merupakan bekas dari kekuasaan Seljuk, berhasil memperluas kekuasaannya hingga mencakup Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara. Keberhasilan ini didukung oleh sistem politik dan militer yang terstruktur dengan baik serta kekuatan ekonomi yang stabil dan tangguh.

Kekuasaan para sultan Dinasti Utsmaniyah diwariskan secara turun-temurun. Namun, tidak ada aturan yang menetapkan bahwa pewaris takhta harus selalu putra sulung. Dalam beberapa kasus, putra kedua ataupun putra ketiga yang menjadi penerus kekuasaan, dan seiring berjalannya waktu, pergantian kekuasaan di Dinasti Usmaniyah

bisa juga jatuh ke tangan saudara laki-laki sultan, bukan putranya.(Syafiq A. Mughni 1997)

Reformasi Pada Masa Dinasti Usmaniyah

Pada akhir abad ke-18, Kesultanan Utsmaniyah mengalami serangkaian kekalahan militer dan kehilangan wilayah penting. Sistem pemerintahan dan militer yang sudah usang menjadi kendala utama dalam menghadapi kemajuan kekuatan Eropa. (Quataert 1922) Saat Sultan Mahmud II memegang jabatan kekuasaan, ia mulai melakukan upaya pembaharuan yang berfokus pada perubahan internal, juga termasuk hal organisasi pemerintahan dan sistem hukum. Setelah Sultan Mahmud II, dimulailah Era Tanzimat atau reorganisasi.(Rofiq 2009)

Tanzimat secara bahasan berasal dari kata tanzhiman, bentuk mashdar dari kata nazhzhama-yunazhzhimu, yang berarti mengatur, menyusun, atau memperbaiki. Tanzimat mengacu pada upaya reformasi di dalam struktur kehidupan masyarakat dan upaya untuk mencapai sentralisasi pemerintahan yang efektif.(Mu'ammam 2016) Dengan kata lain, upaya reformasi pada masa pemerintahan Dinasti Usmaniyah ditandai dengan munculnya para intelektual Turki yang saat itu mempelajari berbagai bidang dari Barat. Era Tanzimat terjadi pada saat kekuatan Barat mulai ikut campur dan terlibat dalam permasalahan internal Turki Ottoman.(Muvid 2022)

Era Tanzimat secara resmi dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Gulhane pada tahun 1839 oleh Sultan Abdul Majid I. Dekrit ini menjanjikan kesetaraan di hadapan hukum untuk seluruh warga negara, tanpa memandang agama, serta mengusulkan reformasi dalam sistem perpajakan dan wajib militer. Kemunculan Tanzimat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut; *Pertama*, Kesultanan Usmaniyah di desak bangsa Eropa agar warga Eropa non-Muslim yang berada di dalam kekuasaan Kesultanan Usmaniyah bisa terlindungi dengan baik. *Kedua*, Otoritas hukum Dinasti Turki Utsmani menerapkan hukum fikih yang menetapkan hukuman mati bagi orang Eropa yang murtad yang berada di bawah kekuasaannya. *Ketiga*, gerakan revolusi di Barat telah mempengaruhi para tokoh Tanzimat saat menuntut ilmu, sehingga mereka berusaha membatasi kekuasaan sultan yang bersifat absolut.(Quddus 2019)

Beberapa motif utama yang mendorong dimulainya Reformasi Tanzimat pada tahun 1839.

1. Melemahnya kekuatan Politik dan Militer

Kekalahan dalam perang melawan negara-negara Eropa serta berbagai pemberontakan di wilayah kekuasaan menunjukkan melemahnya kekuatan politik dan militer Kesultanan Utsmaniyah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memandang perlunya melakukan reformasi guna memulihkan dan memperkuat kembali posisi politik dan militer Utsmaniyah.(Rosdiana 2024)

2. Krisis Ekonomi

Keadaan ekonomi Utsmaniyah semakin diperburuk oleh korupsi, ketidakefisienan dalam administrasi, dan sistem perpajakan yang tidak adil. Oleh karena itu, pembaruan dianggap penting untuk memperbaiki sistem keuangan dan administrasi agar menjadi lebih efisien dan efektif.”

Korupsi, ketidakefisienan dalam administrasi serta sistem perpajakan yang tidak adil semakin memperburuk keadaan ekonomi Utsmaniyah. Pembaruan diperlukan untuk memperbaiki sistem keuangan dan administrasi agar menjadi lebih efisien dan efektif.(Hasibuan et al. 2023)

3. Desakan dari negara Eropa

Reformasi dilaksanakan oleh Dinasti Utsmaniyah karena didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi dan militer yang dicapai oleh kekuatan Eropa. Politik internal Utsmaniyah turut dicampuri oleh Eropa dengan alasan untuk melindungi minoritas Kristen, sehingga pemerintah menganggap reformasi sebagai langkah agar integritas territorial tetap bertahan dengan baik.

4. Gerakan Nasionalis dan pemberontakan internal

Kebutuhan akan reformasi dalam struktur pemerintahan menjadi semakin mendesak agar stabilitas politik dan keutuhan wilayah Kesultanan Utsmaniyah tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini tercermin dari munculnya berbagai gerakan nasionalis dan pemberontakan internal di sejumlah provinsi, yang menandakan meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan lama serta melemahnya loyalitas rakyat terhadap otoritas pusat.(Quataert 1922)

Perkembangan ini juga memperlihatkan tumbuhnya kesadaran politik di kalangan rakyat Utsmaniyah, yang turut dipengaruhi oleh penyebaran gagasan nasionalisme dari Eropa. Karena itu, reformasi dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan potensi disintegrasi, memperkuat persatuan sosial, serta membangun kembali hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah-daerah kekuasaannya.

5. Kebutuhan untuk modernisasi

Pentingnya mengadopsi metode dan teknologi Barat untuk mempertahankan relevansi serta kekuatan kekuasaan di tengah perubahan global yang disadari oleh para pemimpin Utsmaniyah. Prinsip-prinsip Barat diimplementasikan dalam sistem administrasi dan hukum melalui Reformasi Tanzimat.

6. Desakan dan ketidakpuasan rakyat

Kebutuhan pembaruan akan membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik serta lebih adil dan keinginan yang didorong oleh ketidakpuasan di kalangan rakyat akibat ketidaksetaraan sosial dan tindakan sewenang-wenang dari pejabat lokal akan terpenuhi.(Rosdiana 2024)

Implementasi Reformasi Tanzimat Era Dinasti Usmaniyah

1. Reformasi administrasi

Struktur pemerintahan yang lebih menarik, terorganisir dan diselenggarakan dengan baik dimulai oleh Reformasi Tanzimat. Bagian dari langkah penting dalam hal ini adalah pembentukan Konsili Agung di tahun 1838, yang tujuannya sebagai badan legislatif dan yudikatif, serta pembentukan Kantor Administrasi Umum untuk menangani administrasi.(Herawati 2022)

Pembentukan lembaga-lembaga administrasi baru dan jaminan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan hukum, ditetapkan melalui Dekrit Gulhane yang diumumkan pada 3 November 1839. Pembaruan ini juga mencakup sentralisasi pemerintahan untuk mengurangi kekuasaan pejabat lokal yang sering berbuat tidak adil dan sewenang-wenang. Restrukturisasi ini meliputi pembentukan sistem pemerintahan provinsi yang lebih terstruktur dengan baik dan pengawasan lebih ketat dari pusat.(Quataert 1922)

2. Reformasi hukum dan hak kesetaraan

Kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang agama ataupun etnis merupakan tujuan diciptakannya Reformasi Tanzimat. Tujuan ini diterapkan dalam penerapan Dekrit Gulhane (1839) dan Dekrit Humayun (1856), yang bertujuan menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kehormatan, dan harta benda. Pembentukan dan penyusunan hukum baru yang disebut dengan Majalla, yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum Eropa, juga diliputi oleh reformasi hukum ini. Meskipun kemajuan ini merupakan langkah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, implementasi reformasi sering kali tidak merata dan tidak menerima persetujuan dari kelompok-kelompok konservatif.(Jaenudin 2019)

Mereka menolak perubahan ini karena khawatir Majalla akan mengganggu nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam yang sudah ada. Penolakan terhadap reformasi ini sering kali didorong oleh keyakinan bahwa perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kekuatan dan otoritas hukum Islam.

3. Modernisasi militer

Bagian penting dari tujuan utama dalam penerapan Tanzimat adalah modernisasi militer. Akademi militer dibentuk dan pelatihan dengan sistem baru dirancang supaya profesionalisme prajurit Dinasti Utsmaniyah semakin meningkat. Di samping itu, senjata dan peralatan militer modern dari Eropa juga diadakan untuk memperkuat kekuatan militer. Langkah penting yang dilakukan pemerintahan adalah dengan pengenalan wajib militer secara universal, yang melibatkan seluruh warga negara, termasuk non-Muslim, untuk membentuk angkatan bersenjata yang lebih inklusif dan tangguh.(Erik jan Zürcher, 2003).

4. Bidang pendidikan

Tanzimat membangun sekolah-sekolah modern yang mengadopsi kurikulum berdasarkan ilmu pengetahuan serta teknologi Barat pada bidang pendidikan oleh Tanzimat. Tujuan didirikannya sekolah-sekolah tersebut merupakan upaya kesultanan

dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman modern, dengan fokus pada pendidikan sains, matematika, dan bahasa asing. Di sisi lain, akses pendidikan semakin diperluas dan bercampur untuk mencakup anak laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang agama dan etnis, meskipun masih ada keterbatasan akses bagi beberapa kelompok.(Quataert 1922)

Dampak Reformasi Tanzimat Terhadap Perkembangan Sosial dan Politik Kesultanan Usmani

1. Perubahan sosial Kesultanan Utsmani

Reformasi Tanzimat membawa perubahan besar dalam struktur sosial Kesultanan Utsmaniyah. Penghapusan sistem feodal dan pemberlakuan sistem hukum yang lebih adil meningkatkan kesetaraan sosial serta mengurangi diskriminasi berdasarkan agama. Konsep kesetaraan di hadapan hukum dimulai melalui periode Reformasi, yang memberikan keuntungan bagi kaum minoritas non-Muslim di wilayah kesultanan.(Syafiq A. Mughni 1997) Di sisi lain, peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik diberikan oleh modernisasi pendidikan, sehingga kesenjangan antara elit dan rakyat biasa dapat dikurangi.

2. Reformasi hukum serta Hak asasi manusia

Hukum Barat diterapkan dan beberapa hukum tradisional yang diskriminatif dihapus sebagai dampak penting dari Tanzimat. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia diberikan oleh sistem hukum yang baru ini, yang juga mengurangi ketidakadilan dalam penegakan hukum.(Asa'ari 2019) Meski reformasi ini membawa kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Namun, secara keseluruhan, perubahan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam penegakan hak asasi manusia di Turki.(Herawati 2022)

3. Modernisasi dan sentralisasi administrasi

Sistem administrasi yang lebih terorganisir dan terpusat dimulai melalui Tanzimat, yang mana kekuasaan sewenang-wenang dari pejabat lokal dapat berkurang dan mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan.(Davison 1963) Tanzimat juga menghadirkan administrasi yang lebih tertata rapi. Di samping itu, sentralisasi administrasi ini memungkinkan kontrol yang lebih ketat dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat menangani dalam pengelolaan konflik dan pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaan kesultanan.Zürcher, Sejarah Modern Turki.

4. Implikasi terhadap struktur militer

Reformasi Tanzimat memperkenalkan struktur militer yang lebih modern, termasuk pelatihan dan peralatan baru yang sesuai dengan standar Eropa. Kemampuan kekuatan pertahanan Kesultanan Utsmaniyah ditingkatkan melalui modernisasi militer ini, meskipun tantangan dari kekuatan Negara Eropa yang lebih maju tetap menjadi penghalang.(Quataert 1922) Hal ini menjadi ketegasan upaya Kesultanan Utsmaniyah

dalam menyesuaikan diri dengan meningkatkan perkembangan dan kemajuan teknologi serta strategi militer global

Westernisasi Pada Masa Dinasti Usmaniyah

Westernisasi secara harfiah berarti "membaratkan atau membawa unsur-unsur Barat," yang berasal dari kata "westernize".(Wajewasoto 2010) Westernisasi adalah suatu yang mana masyarakat ataupun negara mengadopsi nilai, gaya hidup, institusi, dan teknologi dari negara-negara Barat, terkhusus dari Eropa dan Amerika Serikat. Secara harfiah, istilah ini berasal dari kata "westernize," yang berarti "membawa unsur-unsur Barat." Proses ini mencakup peniruan budaya Barat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti cara berpakaian, perilaku sosial, sistem hukum, praktik ekonomi, bahkan agama.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa westernisasi merupakan dari bentuk usaha meniru gaya hidup ala Barat secara berlebihan, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti mode, perilaku, dan budaya. Di samping itu, para peniru juga rentan memiliki kebiasaan yang merendahkan adat, tradisi, maupun bahasa nasionalnya sendiri.(Sahadewa Gentur and Najicha Fatma Ulfatun 2022)

Proses tersebut sering dilakukan tanpa adanya seleksi atau penyesuaian dengan budaya lokal. Westernisasi dapat dipandang sebagai fenomena yang timbul akibat globalisasi, di mana kemajuan dalam akses informasi dan komunikasi memungkinkan budaya Barat tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dalam artian, Westernisasi adalah sebuah proses pemujaan secara ekstrim terhadap Barat dengan konsep mengadopsi gaya kehidupan mereka secara universal tanpa adanya filter yang memilahnya.(Muhammad Abdul Alim Mursi 1992)

Proses adopsi tersebut bukan hanya berlangsung secara objektif, tetapi juga terjadi secara subjektif, dimana tindakan ini muncul dari gagasan individu, sekelompok masyarakat, atau bangsa untuk mengadopsi dan meniru metode Barat dalam berbagai dimensi dengan tujuan untuk mencapai arah kemajuan.(Hakim 2022) Secara garis besar, gerakan westernisasi di era Kesultanan Utsmaniyah terklasifikasikan kedalam tiga kategori.(Harun Nasution 1996)

Pertama, Islamisme, yaitu gerakan yang berlandaskan prinsip dan norma agama Islam. *Kedua*, westernisme, yaitu dimana pemikiran, sikap, dan gaya hidup sehari-hari dari peradaban Barat kebanyakan diambil oleh gerakan ini. *Ketiga*, nasionalisme, yaitu sebuah gerakan yang berlandaskan pada nilai-nilai tanah air Turki serta mengedepankan sikap patriotisme, sehingga mendorong mereka untuk mengutamakan nasionalisme di atas segalanya.(Abdul Sani 2003)

1. Islamisme

Gerakan yang banyak menyebarkan paham Islamisme adalah para pembaharu yang tetap konsisten memegang teguh terhadap nilai-nilai serta prinsip Islam. Dasar utama yang digunakan oleh mereka adalah kriteria Islam tanpa membedakan keturunan, suku,

atau bangsa. Dalam praktiknya, pemikiran Barat dan nilai-nilai Islam berusaha untuk disatukan oleh para pembaharu ini.

Jepang yang berhasil berkembang dan maju karena mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari Barat, bukan budaya dan peradaban Barat, menarik perhatian kelompok dari gerakan Islamisme ini. Oleh karena itu, mereka beranggapan, bahwa agama Islam tidak dianggap keliru, melainkan cara umat Islam dalam menyikapi dan menerima segala sesuatu yang berasal dari Barat itu merupakan kekeliruan. (Harun Nasution 1996)

Sabilurosyad, yang berarti jalan kebajikan, adalah organisasi yang paling terkenal dalam kelompok ini. Agama Islam tidak pernah dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan suatu negara, seperti yang dinyatakan oleh Said Halim Pasha, salah satu tokoh dalam organisasi tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa kelemahan umat Islam dianggap bukan terletak pada syariatnya, melainkan pada prinsip syariat yang tidak dilaksanakan dengan benar dan semestinya oleh umat Islam. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa konstitusi 1876 tidak sesuai dengan ajaran Islam. (Harun Nasution 1996)

Sebenarnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Barat tidak ditentang oleh kelompok ini. Namun, implementasi paham sekular dalam memodernisasi bidang pendidikan yang ditolak oleh mereka. Prinsip ekonomi modern disetujui oleh kelompok Islamisme ini, namun sistem kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis ditolak oleh mereka. (Abdul Sani 2003)

Di sisi lain, masalah hak antara perempuan dan laki-laki masih dianggap bias gender dalam pandangan kelompok ini. Bahkan pernyataan bahwa perempuan tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti laki-laki dikemukakan oleh beberapa tokoh dari kelompok ini. Salah satu tokoh terkenal dari kelompok ini, Musa Khazim, memberikan alasan bahwa perempuan dianggap memiliki sifat emosional yang berbeda dengan laki-laki. (Ramadlani 2019)

2. Westernisme

Idealisme tokoh-tokoh Barat dianut oleh gerakan Westernisme dalam berbagai komponen aktivitasnya, atau cara pola pikir para intelektual Turki yang pemikirannya telah dipengaruhi oleh Barat. (Muhammad Abdul Alim Mursi 1992) Secara umum, pemikiran Barat secara menyeluruh berusaha diadopsi oleh gerakan ini, sehingga mereka kerap kali melihat masyarakat Turki dengan sudut pandang yang sekuler.

Pembaharuan yang dipelopori oleh para tokoh Turki sebelumnya dilanjutkan oleh gerakan ini. Namun beberapa tokoh yang dianggap mempunyai kemampuan dan mewakili pemikiran tersebut, seperti Taufik Fikret, diakui sebagai bagian dari gerakan ini. Fikret dikenal sebagai pembaharu dan sastrawan yang kerap kali mengemukakan kritik dan menentang kaum tradisional. Di sisi lain terdapat intelektual lain seperti Abdullah Cevdat, yang bergelar doktor. Mereka berdua mempunyai gagasan untuk meninggalkan peradaban tradisional Dinasti Usmaniyah yang dianggap telah tertinggal

dan berusaha mengadopsi konsep-konsep Negara Barat untuk menggantikan peradaban Dinasti Usmani secara menyeluruh.

Kelompok westernisme sering mengkritik ulama tradisional, dengan anggapan bahwa mereka telah menyebabkan umat Islam ke arah kemunduran. Mereka berpendapat bahwa takdir lebih sering diterima oleh ulama dan bersikap pasif terhadap nasib, yang cenderung pada fatalism merupakan pandangan utama ulama. Sikap ini dianggap berdampak negatif untuk masyarakat Turki, yang menjadi enggan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Ajaran syariat tidak dianggap sebagai penyebab kelemahan umat Islam, melainkan sistem sosial yang masih berlandaskan tradisi Islam dan sistem khalifah dianggap sebagai alasannya.(Abdul Sani 2003)

3. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan kelompok yang berusaha menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat Turki dengan mengintegrasikan gagasan westernisme dan nilai-nilai Islam. Langkah ini diambil karena kondisi mendesak yang ditandai oleh perpecahan di kalangan rakyat Turki Utsmani akibat beragam kepentingan yang saling bertentangan.(Tabrani ZA 2016)

Kelompok nasionalisme ini diwakili oleh beberapa tokoh pembaharu, seperti Yusuf Akcura dan Ziya Gokalp. Penyatuan visi masyarakat Turki, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Turki, diupayakan oleh Yusuf Akcura sebagai salah satu tokoh penting. Pada masa itu, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi keberagaman kekuatan, yang meliputi kelompok Islam, masyarakat Turki pribumi, serta warga non-Islam.(Wardana, 2024)

Yusuf Akcura berpendapat bahwa upaya membentuk bangsa Turki dari berbagai elemen di bawah kekuasaan Kesultanan adalah hal yang mustahil, karena negara-negara Barat akan berusaha mencegah terciptanya persatuan politik umat Islam secara global. Namun, ia percaya bahwa jika ia mengembangkan Pan Turkisme, persatuan berdasarkan bahasa, maka upaya tersebut akan mendapatkan apresiasi serta dukungan dari seluruh masyarakat Turki.(Tabrani ZA 2016)

Ziya Gokalp merupakan pemikir yang berperan penting dalam merumuskan gagasan nasionalisme Turki. Ia dikenal konsisten dalam mengharmonisasikan nilai-nilai warisan Kesultanan Utsmaniyah dengan semangat modernisasi yang berkembang di dunia Barat. Menurut pandangannya, bangsa Turki memiliki identitas khas yang terbentuk dari perpaduan unsur Arab-Islam dan Bizantium yang telah berakar sejak abad pertengahan. Ia menegaskan bahwa modernisasi tidak semestinya dimaknai sebagai upaya menanggalkan tradisi, melainkan proses menyelaraskan warisan budaya lama dengan kebutuhan dan dinamika zaman modern.

Sebagai respons terhadap ketegangan antara tradisi dan modernitas, Gokalp mengajukan konsep transformasi peradaban Turki dari sistem sosial tradisional menuju struktur masyarakat modern layaknya Eropa, namun tetap berpijak pada nilai-nilai

budaya dan identitas nasional Turki. Ia menilai kegagalan Reformasi Tanzimat berakar pada kecenderungan para tokohnya yang meniru peradaban Barat secara total tanpa menyesuaikannya dengan realitas sosial dan karakter kebangsaan mereka sendiri. Menurutannya, pembaruan yang ideal hanya dapat diwujudkan melalui sintesis antara warisan budaya nasional dan semangat kemajuan yang rasional serta ilmiah. (Zürcher 2003)

Pemikiran Gokalp kemudian menjadi pijakan konseptual bagi lahirnya nasionalisme Turki modern yang menekankan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerimaan terhadap kemajuan. Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak seharusnya bergantung pada peniruan terhadap Barat, melainkan pada reinterpretasi nilai-nilai lokal dalam kerangka modernitas yang adaptif.

Gagasan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kebangkitan intelektual dan reformasi politik di awal abad ke-20, terutama pada kebijakan sosial, budaya, dan pendidikan yang diimplementasikan oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam membentuk identitas nasional Turki yang sekuler, modern, namun tetap berakar kuat pada budaya asli bangsanya.

Dampak Westernisasi di Kesultanan Usmaniyah

Westernisasi pada masa Dinasti Usmaniyah adalah sebuah proses yang rumit dan melibatkan banyak aspek, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan budaya. Proses ini berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Westernisasi membawa dampak besar pada aspek sosial dan budaya masyarakat Utsmani. Pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan didirikannya sekolah-sekolah modern yang mengadopsi sistem kurikulum Barat. Banyak pelajar dikirim ke Eropa untuk menimba ilmu, yang kemudian mendorong penyebaran pemikiran sekuler dan liberal di kalangan elit. (Ma'afi 2010) Selain itu, kegiatan penerjemahan karya-karya ilmiah Barat ke dalam bahasa Arab dan Turki semakin meningkat, memperkenalkan gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme dan demokrasi. (Faiz 2024)

Meski begitu, dampak dari westernisasi tidak selalu bersifat positif. Perubahan yang berlangsung dengan cepat sering membuat masyarakat tradisional merasa terasing. Proses sekularisasi mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya memunculkan konflik antara tradisi Islam dan tuntutan modernitas. (Asa'ari 2019)

Dalam ranah politik, westernisasi memunculkan dualisme hukum, di mana hukum syariah mulai tersisih oleh hukum Barat. Perjanjian kapitulasi memberikan hak istimewa kepada warga negara asing, sehingga melemahkan otoritas hukum Utsmani dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. (Herawati 2022) Situasi ini turut

berperan dalam melemahkan kekuasaan Dinasti Utsmani, yang akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I.

KESIMPULAN

Reformasi Tanzimat dan westernisasi pada masa Dinasti Turki Utsmani merupakan upaya untuk menghadapi tantangan internal serta tekanan eksternal, terutama dari kekuatan Eropa. Reformasi ini membawa dampak besar pada berbagai bidang, seperti administrasi, hukum, militer, dan pendidikan. Tanzimat berhasil mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan terpusat, menciptakan kesetaraan hukum, serta meningkatkan efektivitas militer. Di sisi lain, westernisasi memperkenalkan pemikiran dan teknologi Barat yang juga memengaruhi budaya serta nilai-nilai sosial masyarakat Utsmani.

Tiga aliran utama, Islamisme, Westernisme, dan Nasionalisme, muncul sebagai pendekatan yang berbeda untuk menghadapi pengaruh Barat. Islamisme menekankan harmoni antara nilai-nilai Islam dan kemajuan, Westernisme lebih fokus pada penerapan konsep-konsep sekuler Barat, sedangkan Nasionalisme berusaha menggabungkan elemen lokal dengan proses modernisasi.

Meski membawa manfaat bagi modernisasi dan stabilitas Kesultanan Utsmaniyah, reformasi Tanzimat dan westernisasi juga menghadapi tantangan berupa penolakan dari kelompok konservatif dan kesulitan implementasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak hanya memberikan kemajuan, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam struktur sosial dan politik kesultanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sani. 2003. *Lintasan Sejarah Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asa'ari, Asa'ari. 2019. "Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18 (02): 49–64. <https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.310>.
- Davison, Roderic H. 1963. *Reform in the Ottoman Empire*. Princeton University Press.
- Dedi Supriyadi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faiz, Muhammad. 2024. "Latar Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II." *IJIH: Indonesia Journal of History and Islamic Civilization* 1 (1): 61–74.
- Gunawan, Gempa, and Hendra Hendra. 2023. "Pengaruh Keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 3 (2): 312–31. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8852>.
- Hakim, Muhammad Luthfi. 2022. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1 (1): 41–61. <http://dx.doi.org/10.29240/berasan.v1i1>.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.

- Harun Nasution. 1996. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hasibuan, Samsul Bahri, Ading Kusdiana, Wawan Hernawan, and M Boy Al. 2023. "Keruntuhan Kerajaan Turki Ustmani Serta Implikasinya Terhadap Islam (1566-1924)." *GJMI: Gudang Jurnal Disiplin Ilmu* 1 (September): 228–33.
- Herawati. 2022. "Pembaruan Dan Pengaruhnya Di Turki Usmani," 3–4.
- Jaenudin, Jaenudin. 2019. "Penerapan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10 (1): 19–34. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5144>.
- Lapidus, Ira. 1993. *No Title a History of Islamic Society*. cambridge university press.
- Ma'afi, Rif'at Husnul. 2010. "Penerapan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Mesir Dan Turki." *Al-Qanun* 13 (1): 209–34.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'ammam, M. Arfan. 2016. "KRITIK TERHADAP SEKULARISASI TURKI: Telaah Historis Transformasi Turki Usmani." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11 (1): 117–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.117-148>.
- Muhammad Abdul Alim Mursi. 1992. *Westernisasi Dalam Pendidikan Islam, Cet.I*. Jakarta: Fikahati Anesta.
- Muvid, Muhamad Basyrul. 2022. "Sejarah Kerajaan Turki Utsmani Dan Kemajuannya Bagi Dunia Islam." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 20 (2): 13–44. <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.723>.
- Quataert, Donald. 1922. "The Ottoman Empire , 1700 – 1922" 1914 (1994).
- Quddus, Abdul. 2019. *Islam Modernis : Sejarah, Ide & Pembaharuan Di Dunia Islam*.
- Ramadlani, Ilyas Fahmi. 2019. "Perjuangan Badiuzzaman Said Nursi Dalam Membendung Arus Sekularisasi Di Turki." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3 (1): 43–50. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1226>.
- Rofiq, Choirul. 2009. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Rosdiana, Rosdiana. 2024. "Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876)." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7 (1): 908–15. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2349>.
- Sahadewa Gentur, and Najicha Fatma Ulfatun. 2022. "Kontribusi Mahasiswa Dalam Menghadapi Westernisasi Sebagai Bentuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (1): 560–66.
- Syafiq A. Mughni. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki. Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Tabrani ZA. 2016. "PERUBAHAN IDEOLOGI KEISLAMAN TURKI (Analisis Geo-Kultur Islam Dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani)." *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2 (2): 130. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812>.
- Thohir, Ajid. 2009. "Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam - Ajid

Thohir.Pdf.”

Wajewasoto. 2010. “Kamus Lengkap Inggris Indonesia Serta Indonesia Inggris, Cet.III.”

In . Jakarta; Warta,.

Wardana, Andhena Wisnu, and Fadil. 2024. “Dinamika Reformasi Dan Westernisasi Yang Terjadi Pada Masa Pemerintahan Kerajaan Turki Usmani.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16 (2): 205–21. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1246>.

Zürcher, Erik jan. 2003. *Sejarah Modern Turki*. jakarta; gramedia pustaka utama.